

# ANALISIS PENGAWASAN PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

## *ANALYSIS OF EMPLOYEE SUPERVISION AT THE HOUSING OFFICE OF RESIDENTIAL AREA AND LAND OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE*

<sup>1</sup>Mulyani Nitasyawal, <sup>2</sup>Nurmiati, <sup>3</sup>Fery

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu*

*Email :*

[Mulyanitasyawal@gmail.com](mailto:Mulyanitasyawal@gmail.com)

*Email :*

[nurmiati.nurmiati@gmail.com](mailto:nurmiati.nurmiati@gmail.com)

*Email : fery.fery@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. 2). Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan serangkaian metode yang terdiri atas: pengamatan (observasi) Wawancara dan penelusuran dokumentasi untuk data primer dan melakukan penelusuran daftar pustaka untuk memperoleh data sekunder. Informan penelitian ini adalah sebanyak 5 orang yang ditetapkan secara *purposive*. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Pengawasan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan berupa pemeriksaan dan pengkajian untuk mengetahui dan menilai apakah kegiatan yang dilakukan staf atau pegawai telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya atau tidak. Sistem atau pola pengawasan pimpinan terhadap bawahan yaitu melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan atasan dengan cara mendatangi dan memeriksa secara langsung terhadap para staf bawahan. Yang diawasi dalam hal ini adalah para staf dan bidang-bidang serta seksi-seksi, sehingga apabila dianggap perlu pimpinan dapat langsung memberikan petunjuk dan instruksi ataupun keputusan secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan ini dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan ruang lingkup tanggung jawabnya. Pengawasan tidak langsung yaitu berupa pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan terhadap bawahan yang memberikan bentuk laporan-laporan kegiatan, baik dalam bentuk kata-kata dan atau data statistik yang menggambarkan hasil yang telah dicapai. Kedua bentuk pengawasan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan bagi tiap-tiap pegawai.

**Kata kunci :** Pengawasan pegawai

### **ABSTRACT**

*This research aims at finding out (1) the implementation of principal's control in this case agency principal of housing border residence and land of Central Sulawesi Province, (2) support and constraint factors of implementation, principal's control that is agency pricipal of housing border recidence and land of Central Sulawesi Province and to find out*

*how far the effect of control against staff performance of agency principal of housing border residence and land of Central Sulawesi Province. This research is qualitative one. To get data, both primary and secondary, a sequence of methods consisting of observation, interview and discovery documentation done for primary data, and investigation bibliography as secondary data. The informants of this research 5 (five) selected purposively. The research finding shows that control of agency principal of housing border residence and land of Central Sulawesi Province is an effort action done as control and study to identify and measure whether or not the activity done by staff has been appropriate with what has been planned before. System or pattern of principal's control are staff through principal by visiting and control directly against employees. Those controlled are staffs and subsections and section, so that if it is considered necessary, the principal can directly give direction and instruction or decision directly concerns and influence the process of activities which are done gradually based on the scopes of one's responsibility. Indirect control is a control which is done by principal toward employees, namely control and gives as activity reports., both in the word form (verbal) or statistic data that represent result that has been reached. The two control forms are effected against the implementation of work for every staff.*

**Keywords :** control of staff

## **PENDAHULUAN**

Peradaban manusia semakin berkembang setiap waktunya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan peradabannya yang semakin berkembang dan kebutuhan akan hidup bersama dengan manusia lainnya, maka manusia terdorong untuk memiliki suatu perkumpulan. Perkumpulan itu disebut organisasi. Hubungan antara manusia dan organisasi sangatlah erat. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan organisasi. Sebagai contohnya manusia memerlukan sekolah, perkumpulan olahraga, perkumpulan agama, perkumpulan musik. Sedangkan organisasi memerlukan manusia sebagai faktor penggerak. Kegiatan organisasi tidak akan terlepas dari faktor manusia. Faktor hidup matinya organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada keterlibatan dan keaktifan manusia. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi antara lain *financial*/modal, fisik/material, teknologi dan manusia. Sumber-sumber tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin sehingga tujuannya tercapai.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Para ahli merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang berbeda. Seperti GR. Terry yang dikutip oleh Sulistriyo (2003 : 38) merumuskan fungsi manajemen menjadi empat yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*. Perencanaan dibutuhkan untuk memberikan arah kepada organisasi guna menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian dibutuhkan untuk dapat merancang bentuk organisasi yang sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan personalia meliputi penarikan, penempatan, latihan dan pengembangan, pemberian orientasi pada pegawai. Sebagus apapun rencana, bentuk organisasi, personil yang

handal yang mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya namun faktor pengawasan tetap memiliki peran yang sangat penting. Pengawasan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Pengawasan yang berjalan dengan baik akan mengurangi dan mencegah kesalahan dari pegawai. Pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung yang disebut pengawasan melekat. Seperti yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi (1995 : 8) berpendapat bahwa : Pengawasan merupakan proses pemantauan, memeriksa, dan mengevaluasi yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit organisasi kecil organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk diperbaiki atau disarankan oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan.

Dengan adanya peraturan dan pengawasan pimpinan atau atasan langsung diharapkan pegawai dapat bersikap disiplin dalam bekerja. Dengan sikap disiplin yang dimilikinya akan membuat lebih mudah untuk melakukan pengarahan dan pelaksanaan kerja bukan bekerja atas dasar ketakutan terhadap ancaman, hukuman, dan pimpinan. Namun diharapkan pegawai dapat bekerja atas dasar kesadaran diri yang tinggi demi tercapainya tujuan organisasi.

### **Sejarah Singkat Dinas Perumahan Kawasan dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.**

Sebelum menjadi bidang tersendiri seperti sekarang, penanganan kawasan telah mengalami proses yang cukup panjang. Diawali dari awal terbentuknya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang no.32 tahun 2004 sehingga kebijakan pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya pada daerah yang mengharuskan daerah membentuk badan-badan yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 tahun 2008 ditetapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu dinas yang ada di struktur pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya dijelaskan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 17 tahun 2009. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi atas 5 bidang yang masing - masing menangani permasalahan pembangunan yang berbeda. Diantaranya adalah bidang perumahan yang membawahi seksi pengembangan kawasan. Secara garis besar seksi pengembangan kawasan menanggulangi peningkatan kualitas permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana utilitas dan fasilitasi bantuan stimulant bagi masyarakat miskin. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum

memiliki banyak tugas dan fungsi sehingga pemerintah pusat merasa perlu adanya pembagian tugas tersebut menjadi beberapa bagian maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 06 tahun 2008 yang menetapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dihapuskan dan diganti menjadi Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang membawahi beberapa bidang, dimana Penanganan Kawasan yang pada awalnya merupakan seksi di Bidang Perumahan berkembang menjadi Bidang sendiri yaitu Bidang Pengembangan Kawasan yang membawahi beberapa seksi. Bidang Pengembangan Kawasan memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan kawasan. Tahun 2017 Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang kembali mengalami perubahan struktur sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 menetapkan bahwa dibentuklah Dinas baru yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bidang Kawasan Permukiman yang menjalankan tugas pokoknya yaitu pembinaan, koordinasi, fasilitasi, serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman Tahun 2017 Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang kembali mengalami perubahan struktur sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 menetapkan bahwa dibentuklah Dinas baru yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaannya Bidang Kawasan Permukiman berkonsentrasi dalam penanganan kawasan kumuh yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini dilaksanakan oleh 2 program yaitu Program Lingkungan Sehat Perumahan.

### **Pengawasan Langsung**

Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan pimpinan atau kepala kantor dengan cara mendatangi dan memeriksa secara langsung aktifitas para staf / bawahan yang diawasi dalam hal ini adalah pegawai yang ada dan bekerja pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga apabila dianggap perlu pimpinan dapat langsung memberikan petunjuk dan instruksi ataupun keputusan secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan ruang lingkup tanggung jawabnya.

Pengawasan langsung yang dilakukan pimpinan terhadap pegawai Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat hasilnya dengan melihat pada

efisiensi, efektifitas kerja pegawai Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Keberadaan pimpinan dalam melakukan pengawasan secara langsung dapat dilihat pada intensitas volume pengawasan yang dilaksanakan pimpinan, karena pada dasarnya intensitas volume pengawasan pimpinan menunjukkan keperdulianya terhadap apa yang dilaksanakan bawahannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.

### **Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung adalah merupakan kebalikan dari pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dilakukan Kepala Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan tanpa mendatangi obyek yang diawasi atau tegasnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dari belakang meja caranya ialah mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen, laporan-laporan yang menyangkut obyek yang diawasi.

Pengawasan tidak langsung ini berupa pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan terhadap bawahan yang memberikan bentuk laporan-laporan kegiatan, baik dalam bentuk kata-kata dan atau data statistik yang menggambarkan hasil yang telah dicapai, sesuai dengan waktu, dimana pelaksanaannya serta besarnya anggaran yang dikeluarkan dan penggunaan dalam kegiatan tersebut.

Pengawasan tidak langsung dilakukan Kepala Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada stafnya umumnya berdasarkan laporan yang disampaikan oleh bawahan terhadap atasan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dalam kurun waktu tertentu, biasanya telah ditetapkan secara rutin untuk melaporkan berbagai kegiatan tersebut, serta terdapat ketetapan pelaporannya setelah selesainya kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan tugas-tugas dan instruksi yang diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis yang diberikan bawahan maka atasan dapat membaca apakah bawahan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak atau kekuasaan yang didelegasikan kepadanya.

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan pihak pimpinan terhadap bawahan pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga memberi arti dan manfaat yang cukup besar dalam monitoring pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pada staf atau bawahannya. Jikapun ada pengawasan langsung sudah dilaksanakan, bukan berarti pengawasan tidak langsung tidak baik. Justru kedua bentuk pengawasan tersebut

dianggap saling mendukung dan saling melengkapi. Jika ada penyimpangan yang tidak sempat terekam saat pengawasan langsung, maka dalam pengawasan tidak langsung penyimpangan tersebut bisa terekam atau diketahui. Selain itu patut dimengerti pula bahwa pihak pimpinan tidak selamanya dapat melaksanakan pengawasan langsung secara prima, sehingga jelas masih memerlukan bentuk pengawasan yang lainnya dan itulah pengawasan tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung yang dipraktekkan pada instansi lokasi penelitian penulis adalah melalui penelaahan laporan-laporan kinerja bawahan yang dilaporkan kepada atasan. Dilakukan analisis serta penilaian. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka pihak atasan juga melakukan pemanggilan langsung kepada bawahan yang melakukan kekeliruan dimaksud, baik dalam bentuk panggilan tidak tertulis, maupun tertulis.

### **Pengawasan Pimpinan terhadap pegawai di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.**

Pengawasan sebagaimana lazimnya adalah suatu proses yang membandingkan antara input dan output bagi suatu organisasi pada suatu kurun waktu tertentu. Pengawasan pimpinan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimaksudkan untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat terjadi dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja, disiplin kerja para pegawai. Dalam hal pengawasan yang dilaksanakan Kepala Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara fungsional ini, diharapkan untuk mencapai disiplin kerja pegawai, karena itu maka organisasi pemerintah Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus menerapkan prinsip *span of control* atau *span of management*. Span of control atau span of management adalah suatu prinsip dalam bentuk angka yang menunjukkan seberapa jauh seorang pimpinan atau kepala kantor (baik dalam arti partial atau unit – unit yang ada, maupun secara keseluruhan) dapat membimbing sekaligus mengawasi bawahannya dan secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan disiplin kerja pegawai. Berbicara mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau Kepala Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, berarti berbicara tentang sistem pengawasan yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang menyatu secara totalitas dalam suatu pola. Sistem pengawasan bertujuan untuk mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan melakukan

koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan, atau kekeliruan sehingga tidak terulang dimasa yang akan datang, mencegah atau memperkecil pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sistem administrasi yang tertib, teratur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penyelenggaraan pembangunan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memerlukan adanya seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Kantor yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya secara berdayaguna dan berhasil guna. Pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan atau pimpinan atau kepala kantor pada dasarnya adalah mengawasi semua apa yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diarahkan, tanpa pengawasan yang baik terhadap ke-tiga unsur manajemen semua usaha akan sulit mencapai efektivitas tujuan. Materi yang diawasi pimpinan adalah tiga hal atau kombinasinya yaitu uang, barang dan orang. Ketiganya masing-masing memerlukan penanganan secara berlainan. Diantara ketiganya yang lebih mudah diawasi uang dan barang karena biasanya dalam keadaan konstan, untuk pengawasan terhadap orang relatif lebih sulit karena ada perbedaan spesifikasi atau karakter dan kapabilitas masing-masing individu. Setiap individu memiliki watak, karakter ataupun sifat sendiri-sendiri yang dalam memberikan pengawasan tidak mungkin diberikan perlakuan yang sama. Ada individu yang memiliki karakter serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, disiplin, taat terhadap aturan serta loyal terhadap perintah atasan. Karakter individu ini pada dasarnya tidak perlu mendapat pengawasan oleh karena mereka selalu sadar atas keberadaannya dalam organisasi. Jikapun diberi pengawasan hanya sekedar untuk mengetahui kondisi sesaat. Sebaliknya ada pula individu yang memiliki karakter kurang menyenangkan seperti karakter tidak disiplin, senang memandang enteng waktu, tidak taat terhadap aturan, tidak loyal terhadap atasan sehingga tugas pokok dan fungsinya serung terbengkalai. Bahkan ada pegawai yang senang terlambat datang ke kantor dan pulang sebelum waktunya. Individu inilah yang sesungguhnya selalu menjadi sasaran pengawasan agar dapat merubah sikap, watak kepada sebuah sikap yang lebih baik.

### **Pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah**

Seperti diketahui bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah

mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang. Dua prinsip pokok yang merupakan suatu condition sine quanon bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan. Dengan demikian maka pengawasan adalah suatu proses kegiatan pimpinan membandingkan, memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta kegiatan organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar, rencana, intruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan sumber daya yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan bukan bermakna mencari-cari kesalahan, bagaimanapun juga manusia adalah tempatnya keliru dan salah sehingga jika ada kekeliruan atau kesalahan serta penyimpangan yang terjadi, adalah suatu yang wajar. Hadirnya pengawasan yang dilaksanakan, itulah yang dijadikan alat agar [enyimpangan tersebut tidak terulang kembali.

Begitu banyak manfaat dan bahkan pengaruh pengawasan yang dirasakan oleh setiap personil yang bekerja dalam instansi berdasarkan tupoksinya, antara lain adalah bahwa dengan pengawasan, maka setiap personil yang ada di instansi merasa termotivasi untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak mau melakukan kesalahan ataupun kekeliruan yang dapat merugikan, bukan hanya pada dirinya tetapi juga kepada lembaga atau instansi dimana ia bekerja.

### **Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan terhadap pegawai di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.**

#### **a. Faktor pendukung.**

Sesuai dengan hasil penelitian lapangan dan analisis yang telah dilakukan, ditemukan faktor pendukung bagi pihak pimpinan atau kepala Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan pengawasan, yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya perangkat lunak, berupa peraturan/normatif sebagai landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pengawasan baik secara operasional maupun koordinasi, seperti : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 46 Tahun 2004



tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, beberapa petunjuk teknis waskat, dan beberapa instrument yang digunakan sebagai checklist waskat. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Kepala Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melaksanakan pengawasan.

- 2) Kemauan yang serius mulai dari pucuk pimpinan dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai pada staf bawahan untuk tetap komitmen untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. Komitmen ini penting untuk dilakukan sebagai pesan moral pada setiap individu yang bekerja pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### **b. Faktor penghambat**

Di samping terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi pengawasan terhadap Aparat Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdapat faktor penghambat. Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis penulis pada saat melaksanakan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa :

- 1) Kurang tegasnya Pimpinan dalam menindak staf atau bawahan yang datang tidak tepat waktu dan pulang sebelum waktu kerja selesai, dikarenakan faktor ikatan famili atau keluarga terhadap pimpinan, padahal ketegasan Kepala Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan staf. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap staf yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi pegawai secara keseluruhan.
- 2) Tidak adanya sanksi hukuman bagi staf yang indisipliner jika kita telaah kembali hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan adanya sanksi hukuman bagi siapapun dengan tidak memandang adanya ikatan keluarga, umur dan jabatan diharapkan seluruh pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan, sikap, dan perilaku indisipliner pegawai Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Temuan penelitian yang dikemukakan di atas sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, merupakan sebuah konsekuensi dari kemajuan dan perkembangan sebuah lembaga. Bahwa selalu ada kendala dalam pelaksanaan tugas, termasuk tugas-tugas

kepengawasa itu pasti ada, hal itu disebabkan oleh semakin kompleksnya tugas-tugas yang diemban oleh lembaga yang bersangkutan. Terkadang menuntut agar pimpinan harus tegas dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar, tetapi pimpinan juga manusia, terkadang masih mengutamakan jiwa sosialnya dari pada yang lainnya.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian serta analisis data yang telah penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan berupa pemeriksaan dan pengkajian untuk mengetahui dan menilai apakah kegiatan yang dilakukan staf atau pegawai telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya atau tidak.
2. Sistem/pola pengawasan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan melakukan koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan, atau kekeliruan sehingga tidak terulang dimasa yang akan datang. Adapun sistem atau pola pengawasan pimpinan terhadap bawahan yaitu melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

apabila dianggap perlu pimpinan dapat langsung memberikan petunjuk dan instruksi ataupun keputusan secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan ini dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan ruang lingkup tanggung jawabnya. Pengawasan tidak langsung yaitu berupa pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan terhadap bawahan yang memberikan bentuk laporan-laporan kegiatan, baik dalam bentuk kata-kata dan atau data statistik yang menggambarkan hasil yang telah dicapai. Kedua bentuk pengawasan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan bagi tiap-tiap pegawai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Darma. 1992. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta : Erlangga.

Alex Nitisemito. 1996. *Manajemen Personalialia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Arikunto Suharsini, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djarwanto PS. 1990. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Djati Julitriarsa dan John Suprihantoro. 1998. *Manajemen Umum*. Jakarta : BPFE.
- Djoko Prakoso.1992. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fathoni Abdurrahmat, 2006, *Organisasi dan Manajemen*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadari Nawawi. 1994. *Ilmu Administrasi*. Jakarta : Ghalia.
- Hani Handoko. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Hardiyansyah, 2012, *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Gava Media, Yogyakarta.
- Lexy J Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Malayu. S.P. Hasibuan. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : UGM University Press.
- Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia.
- Miles Matthew B, Huberman A Michael, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi. Cetakan Pertama. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moekijat.1990. *Manajemen Kepegawaian*. Bandung : Alumni.
- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Musanef , 1996, *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, Gunung Agung. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Manajemen Kepegawaian*, Aksara. Bandung.
- Noeng Muhajir. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Patilima Hamid, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, BPFE, Yogyakarta.
- Silalahi Ulbert, 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi)*. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
- Soegeng Prijodarminto. 1992. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soegiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soetardi. 2005. *Penelitian Pendidikan II*. FKIP UNS.
- Sondang P Siagian. 1981. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1989. *Aspek-Aspek Pengawasan*. Jakarta : Ghalia.

Susilo Martoyo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.

Sutopo HB. 2002 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press

Sutrisno Hadi. 1991. *Metodologi Research*. Yogyakarta : UGM Press.

Winardi. 2002. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.

Winarno Surachmad. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*.  
Bandung : Tarsito.

### **Dokumen**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden RI No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

### **Sumber Lain.**

Husnawati 2012, *Pelaksanaan Pengawasan Camat Terhadap Aparat Pemerintah di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara*. Skripsi Fisip Unismuh Palu.

Suryanti Fabanyo, 2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Skripsi Fisip Unhas, Makassar.